

PRAKTIK MANAJEMEN PEMERINTAHAN DESA DALAM PENGEMBANGAN DESA WISATA DI DESA BAHA KECAMATAN MENGWI KABUPATEN BADUNG PROVINSI BALI

I Gede Janamijaya, I Ketut Jika, A.A.A Dewi Larantika, Rhesa Anggara Utama

Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Warmadewa Jalan Terompong No.24, Sumerta Kelod. Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali 80239

E-mail : janamijaya5@gmail.com, larantikaagung@gmail.com, jikaketut@gmail.com, rhesa.anggarautama@warmadewa.ac.id

Abstract

This study focuses on the government management practice in the development of tourist villages in Baha Village, Mengwi District, Badung Regency, Bali Province. The ongoing development of tourist villages in Baha Village has been running for a dozen years, but it is believed by many parties to have not been carried out effectively, thus the tourism potential in Baha Village has not been managed well. This study is anticipated to be able to provide an answer to the topic of how government management in the creation of tourist villages in Baha Village has been carried out thus far. The actors involved in the development of tourist villages are analyzed as a unit in this study's qualitative methodology. In-depth interviews, observation, and documentation procedures are used to collect data, and the selection of informants is based on criteria. The findings indicated that the village government and tourism village management groups in Baha Village, Mengwi District, Badung Regency, Bali Province, had implemented government management practices with a variety of agendas, including planning, organizing, mobilizing, and government control, and that these practices had produced successful outcomes, including an improvement in quality. Supporting infrastructure, raising public awareness of the organization and the community, providing financial assistance for the development of rural tourism because it is a Village-Owned Enterprise, and enhancing the quality of the regional natural and cultural environment. The Conclusion of this study indicate that while the practice of creating a tourist village in Baha Village, Mengwi District, Badung Regency, Bali Province has had a positive impact, it has not operated at its best. This is because of the limited capacity of human resources, financing, community involvement, and supporting facilities; therefore, it is necessary to continuously and sporadically strengthen and improve all of its aspects.

Keywords: *Management by the government, development of tourist villages, and Baha Village*

Abstrak

Penelitian ini secara spesifik mengkaji praktik manajemen pemerintahan dalam pengembangan desa wisata di Desa Baha Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Provinsi Bali, berlangsungnya pengembangan desa wisata di desa baha sudah dilakukan belasan tahun namun dinilai berbagai pihak belum dilakukan secara optimal, sehingga potensi wisata di desa baha belum terkelola dengan baik. Melalui penelitian ini diharapkan dapat menjawab pertanyaan bagaimana praktik manajemen pemerintahan dalam pengembangan desa wisata di desa baha berlangsung selama ini. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan unit analisis terhadap aktor-aktor yang terlibat dalam pengembangan desa wisata. Penentuan informan dilakukan berdasarkan kriteria, dimana pengumpulan data menggunakan teknik wawancara mendalam, pengamatan, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik manajemen pemerintahan dalam pengembangan desa wisata di Desa Baha Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Provinsi Bali melalui pemerintah desa serta kelompok pengelola desa wisata telah dilakukan dengan beberapa agenda diantaranya perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, kontrol pemerintahan serta telah menunjukkan hasil positif diantaranya meningkatnya kualitas infrastruktur pendukung, terbangunnya kesadaran aparatur dan masyarakat, alokasi dukungan pembiayaan pengembangan desa wisata karena menjadi bagian unit Badan Usaha Milik Desa, meningkatnya kualitas lingkungan alam budaya setempat. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan adalah terjadinya praktik pengembangan desa wisata di Desa Baha Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Provinsi Bali telah memberikan dampak positif namun belum berjalan secara optimal, hal tersebut sangat terkait dengan keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, pembiayaan, partisipasi masyarakat, fasilitas pendukung, sehingga perlu dilakukan penguatan dan peningkatan terhadap segala aspeknya secara berkesinambungan dan berkala.

Kata kunci : Manajemen Pemerintahan, Pengembangan Desa Wisata, Desa Baha

1. Pendahuluan

Pulau Dewata Bali merupakan satu tujuan pariwisata dunia dengan berbagai destinasi wisata yang dinilai sangat layak untuk dikunjungi oleh wisatawan lokal maupun mancanegara. Sejak tahun 1924, (Mill dan Marrison, 2012:17) Bali dinilai sudah layak menjadi destinasi karena memenuhi syarat dengan adanya ketersediaan berbagai atraksi, fasilitas untuk menginap, infrastruktur yang sederhana, transportasi, dan kenyamanan yang dijamin pemerintah kolonial Belanda.

Seiring berjalannya waktu setelah tahun 1992 melalui penyelenggaraan *International Conference on Cultural Tourism* di Yogyakarta, (Oka 2021:2) Pemerintah Provinsi Bali mulai mengembangkan desa wisata untuk memberdayakan potensi-potensi yang ada di desa dengan segala keunikan dan otentisitasnya, berawal dari Desa Penglipuran (Kabupaten Bangli), Desa Sebatu (Kabupaten Gianyar), dan Desa Jatiluwih (Kabupaten Tabanan), ketiga desa inilah sebenarnya cikal bakal pengembangan desa wisata di Bali, selain itu juga menjadi alternatif untuk mengantisipasi kejenuhan wisatawan pada produk-produk wisata yang ditawarkan.

Hadirnya desa wisata tersebut telah memicu berbagai desa di Bali untuk mengembangkan desa menjadi desa wisata salah satunya yaitu desa baha yang telah ditetapkan sebagai desa wisata oleh

Pemerintah Kabupaten Badung Provinsi Bali melalui Peraturan Bupati Badung Nomor 47 Tahun 2010, penetapan tersebut dilakukan mengingat desa baha dinilai memiliki berbagai potensi yang dapat dikembangkan. (Arnawa & Pandawani, 2019) Beragam potensi sumber daya alam yang dapat dikembangkan menjadi sebuah daya tarik wisata mulai dari hamparan sawah (subak) terdiri dari subak lupud dan subak bulan, hamparan perkebunan, pemandangan alam (gunung, bukit, dan sawah), sungai dan goa (goa perjuangan), mata air dan pura beji (wisata tirta), kondisi lingkungan desa yang rapi, pohon ancak sebagai salah satu landmark, cadangan lahan untuk pembangunan.

Adanya berbagai potensi sebagaimana telah diuraikan diatas, pada sisi lain ditemukan berbagai fakta lainnya yang bersifat negatif berdasarkan catatan dari berbagai sumber data penelitian sebelumnya maupun laporan dari kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh perwakilan dari berbagai perguruan tinggi di Provinsi Bali, yang pada intinya dinyatakan bahwa Desa Baha Kecamatan Mengwi dalam pengembangannya sebagai desa wisata belum dilakukan secara optimal sehingga masih dihadapkan dengan berbagai persoalan diantaranya terkait dengan infrastruktur pendukung yang masih minim, pengemasan dan pemasaran produk wisata yang tidak dilakukan secara profesional, belum terkelolanya segala potensi yang

dimiliki oleh Desa Baha, yang pada pokoknya dinilai oleh berbagai pihak sangat terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa baha.

Penelitian awal menunjukkan bahwa pada praktik manajemen pemerintahan dalam pengembangan desa wisata di Desa Baha Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Provinsi Bali dihadapkan dengan berbagai persoalan, berlangsungnya pengembangan desa wisata di desa baha memang sudah dilakukan belasan tahun namun dinilai berbagai pihak belum dilakukan secara optimal, sehingga potensi wisata di desa baha belum terkelola dengan baik. Isu utama yang menjadi persoalan dalam pengembangan desa wisata di desa baha melalui pemerintah desa serta kelompok pengelola desa wisata berdasarkan sumber informasi awal sangat terkait dengan persoalan manajemen pemerintahan yang terkait dengan manajemen perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, kontrol pemerintahan yang belum dilakukan secara berkesinambungan dan berkala. Hal tersebut sehingga menjadi ketertarikan peneliti untuk melakukan penelitian secara mendalam untuk memastikan kebenarannya.

Penelitian ini merupakan penelitian baru mengenai Praktik Manajemen Pemerintahan Desa yang diterapkan pada studi pengembangan desa wisata di Desa Baha Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung

Provinsi Bali, sehingga menjadi pengetahuan baru (*novelty*) dengan *state of the art* kajian Ilmu Pemerintahan dengan mengelaborasi berbagai konsep dan teori yang dikembangkan dalam studi ilmu pemerintahan seperti manajemen pemerintahan, kajian pemerintahan desa dan tata kelola pemerintahan di desa.

Sebagai penegasan penulis bahwa penelitian ini merupakan penelitian baru, hal tersebut dapat dilihat dengan uraian beberapa penelitian terdahulu yang menggunakan konsep manajemen pemerintahan namun tidak ada satu pun yang melakukan penelitian dalam konteks pengembangan desa wisata dengan pendekatan manajemen pemerintahan desa maupun pada lokasi yang sama dengan isu, teori yang serupa sehingga penelitian ini ialah penelitian baru. Penelitian yang dilakukan oleh *Agustinus Widanarto* (2016) terkait dengan “Transformasi Manajemen Pemerintahan Dari Aspek Lingkungan di Kota Bandung”. Penelitian ini memfokuskan melihat transformasi manajemen terhadap isu lingkungan berkaitan dengan peran pemerintah maupun masyarakat yang dinilai belum memahami kondisi dan permasalahan Kota Bandung, baik dari aspek geografis, kependudukan, pemerintahan, perekonomian dan kondisi sosial kemasyarakatannya.

Penelitian berikutnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Hakim (2022) mengenai

manajemen pemerintahan dalam penyediaan ruang terbuka hijau dikota tasikmalaya, penelitian yang memfokuskan pada bagaimana manajemen pemerintahan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya dalam menyediakan Ruang Terbuka Hijau di Kota Tasikmalaya tahun 2016, dan penyebab ketidakberhasilan manajemen pemerintahan yang dilakukan dalam memenuhi jumlah Ruang Terbuka Hijau sebesar 30 % dari luas wilayah Kota Tasikmalaya. Sementara penelitian berikutnya oleh Syarifudi (2018) mengenai Manajemen Pemerintahan Sumber Daya Alam Migas di Kabupaten Bengkalis. Penelitian yang memfokuskan pada permasalahan utama dalam manajemen sumber daya alam migas yaitu dana bagi hasil migas yang diperoleh daerah penghasil migas belum transparan, kemudian masih terdapat kurang koordinasi antara pemerintah dengan pelaku kontraktor serta dengan masyarakat sekitar dalam pelaksanaan manajemen migas.

Berdasarkan pada beberapa fakta empiris yang telah diuraikan diatas, melalui penelitian ini diperoleh pengetahuan baru (*novelty*) tentang pengembangan desa wisata ditinjau dari studi manajemen pemerintahan sebagai *state of the art* kajian ilmu pemerintahan, selain itu belum adanya penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya mengenai pengembangan desa wisata di Desa Baha ditinjau dari sudut pandang manajemen

pemerintahan sehingga dirumuskan pertanyaan, bagaimana praktek manajemen pemerintahan desa dalam pengembangan desa wisata di Desa Baha Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Provinsi Bali dilakukan.

Secara tegas penelitian ini bertujuan mendeskripsikan, dan menganalisis praktik manajemen pemerintahan desa baha dalam mengembangkan statusnya sebagai desa wisata berbasis lingkungan, sehingga diajukan penelitian mengenai **“Praktik Manajemen Pemerintahan Desa Dalam Pengembangan Desa Wisata Di Desa Baha Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Provinsi Bali”**

2. Kajian Pustaka

Beragam definisi dan pemahaman mengenai desa, diantaranya penulis kutip dari Komarudin (2022) menjelaskan Desa adalah suatu entitas wilayah yang memiliki identitas sosial, budaya, dan ekonomi yang unik, dengan kehidupan masyarakat yang lebih terfokus pada kegiatan pertanian dan agrikultural. Selanjutnya pendapat Sumarno (2017) Desa adalah suatu wilayah pemukiman yang memiliki struktur sosial yang didasarkan pada ikatan kekerabatan dan memiliki kegiatan ekonomi yang dominan dalam sektor pertanian

Sementara pemahaman mengenai konsep desa wisata menurut Prasetyo (2017) Desa wisata adalah suatu wilayah pemukiman yang

memiliki potensi wisata alam, budaya, sejarah, atau keunikan lainnya, dan mengembangkan potensi-potensi tersebut untuk menarik wisatawan. Desa wisata juga melibatkan partisipasi aktif masyarakat setempat dalam pengelolaan, pelestarian, dan pengembangan destinasi wisata tersebut.

Pendapat lainnya yaitu Rasyid (2019) adalah suatu konsep pengembangan pariwisata yang bertujuan untuk memperkenalkan dan mempromosikan kekayaan alam, budaya, dan warisan lokal suatu desa kepada wisatawan, tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, melestarikan warisan budaya, dan menciptakan kesempatan kerja bagi penduduk desa.

Dengan demikian maka melalui desa wisata dapat memberikan pengalaman kepada wisatawan maupun kesempatan yang sebesar-besarnya kepada masyarakat untuk mengembangkan berbagai kreatifitas, inovasi, dan kemajuan perekonomian.

Berkaitan dengan praktik manajemen pemerintahan secara konsep Ndraha mengemukakan bahwa manajemen pemerintahan merupakan konsep pemerintahan yang menekankan pada konsep fungsi manajemen diantaranya:

1. Perencanaan pemerintahan.
2. Pengorganisasian sumber-sumber pemerintahan.

3. Penggunaan sumber-sumber pemerintahan.

4. Kontrol pemerintahan. (Ndraha, 2011:160)

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa manajemen pemerintahan adalah sebuah konsep penggabungan antara manajemen dan pemerintahan untuk mencapai tujuan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. bahwa manajemen pemerintahan dalam pengembangan desa wisata dapat dimaknai secara sederhana sebagai sebuah proses dan usaha dalam memperbaiki ataupun merubah sesuatu yang sudah ada dalam meningkatkan, memajukan keadaan menjadi lebih baik dengan rencana-rencana yang telah dirancang dan ditetapkan.

3. Objek dan Metode Penelitian

3.1 Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Baha. Desa baha merupakan salah satu desa dari 15 desa yang ada di Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung Provinsi Bali yang merupakan daerah dengan ketinggian tanah 250 meter diatas Permukaan laut, dengan curah hujan relative rendah, dengan batas wilayah administratif sebagai berikut : Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sobangan, Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Dauh Yeh Cani Abiansemal, Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa

Gulingan, Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Werdi Bhuwana (Dokumen Deskripsi Profil Desa Baha Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Tahun 2022).

Desa Baha memiliki 2 (dua) Desa Adat yaitu (Desa Adat Baha dan Desa Adat Cengkok dan 7 (tujuh) Banjar yaitu Banjar Pengabetan, Kedua, Gegaran, Bedil, Busana Kaja, Busana Kelod dan Cengkok. Dimana Desa Baha ini terdapat 2 (Dua) Desa Adat.

3.2 Metode Penelitian

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif pendekatan kualitatif (*qualitative-descriptive*), dengan unit analisis terhadap aktor-aktor yang terlibat dalam pengembangan desa wisata dengan beberapa informan diantaranya Pemerintah Desa Baha terdiri dari Kepala Desa Baha, Kasi Bidang Ekonomi & Pemberdayaan, Kasi Pembangunan, Kasi Bidang Lingkungan, Kepala Desa Adat Baha, selanjutnya Unsur BPD yaitu Kepala BPD, serta beberapa unsur masyarakat Desa Baha Ketua Subak, Ketua Kelompok Sadar Wisata, Ketua Kelompok Desa Wisata.

Penentuan informan dilakukan berdasarkan kriteria, dimana pengumpulan data menggunakan teknik wawancara mendalam, pengamatan, dan dokumentasi.

Dalam penelitian ini digunakan tipe penelitian kualitatif, Patton (2015) yaitu tipe

penelitian bertujuan untuk memahami dan mendalami fenomena secara mendalam melalui pengumpulan data yang bersifat deskriptif, kontekstual, dan interpretatif. Pendekatan kualitatif memfokuskan pada pemahaman makna, persepsi, dan pengalaman individu atau kelompok dalam konteks yang kompleks dan alami.

Merujuk kepada pemahaman tersebut peneliti memilih desain kualitatif untuk memahami dan menganalisis fenomena yang terjadi dilapangan, mencakup proses pengeksploasian fakta dan data objek di lapangan sebagaimana adanya terkait bagaimana praktik manajemen pemerintahan desa dalam pengembangan desa wisata di Desa Baha Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Provinsi Bali.

Creswell (2013) menegaskan bahwa penelitian kualitatif penting dilakukan untuk mengungkap pemahaman mendalam tentang fenomena sosial, budaya, atau perilaku manusia dari perspektif yang kompleks dan kontekstual, secara esensi dalam pendapatnya yakni berusaha mengungkap secara mendalam fenomena yang akan diteliti. Dalam hubungan itu Sutopo (2016) menekankan bahwa, penelitian kualitatif sebagai sebuah pendekatan penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial dengan cara yang mendalam dan detail. Penelitian kualitatif berfokus pada interpretasi dan pemahaman

terhadap makna subjektif yang diberikan oleh individu atau kelompok yang menjadi objek penelitian.

4. Hasil dan Pembahasan

Melalui hasil penelitian dan pembahasan mengenai praktik manajemen pemerintahan desa dalam pengembangan desa wisata di Desa Baha Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Provinsi Bali, diharapkan pembaca dapat mengetahui dan memahami secara komprehensif upaya yang dilakukan oleh berbagai aktor pembangunan di Desa Baha Kecamatan Mengwi berkaitan dengan pengembangan desa wisata terutama oleh aktor pemerintah desa setempat.

Secara konseptual praktik manajemen pemerintahan terdiri dari beberapa aspek diantaranya aspek fungsi perencanaan pemerintahan, pengorganisasian sumber-sumber pemerintahan, penggerakan sumber-sumber pemerintahan, pengawasan penggerakan sumber-sumber pemerintahan,

4.1 Fungsi Perencanaan Pemerintahan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Baha memiliki peran yang sangat menentukan dalam upaya mengembangkan desa wisata melalui pendekatan fungsi perencanaan pemerintahan, hal tersebut dilakukan melalui berbagai tindakan-tindakan konstruktif yang

berorientasi pada peningkatkan kemajuan desa dalam berbagai aspeknya, salah satunya melalui program pengembangan desa wisata.

Perencanaan pengembangan desa wisata di desa baha dilakukan melalui penetapan dokumen RPJM Desa maupun RKP Desa, sehingga Pemerintah Desa Baha telah memiliki dasar kebijakan dalam pengembangan desa wisata. Adanya program pengembangan desa wisata di Desa Baha sangat terkait dengan potensi budaya dan alam desa baha yang dapat dijadikan sebagai dasar pengembangan desa wisata yaitu mengingat desa baha merupakan salah satu desa di Kabupaten Mengwi Provinsi Bali yang memiliki potensi alam dan budaya sangat potensial untuk terus di kembangkan, bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Baha baik secara skala (lahiriah) maupun niskala (batiniyah).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa dampak yang menjadi harapan dari program pengembangan desa wisata di Desa Baha Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Provinsi Bali, diantaranya yaitu dampak secara ekonomi, sosial budaya, lingkungan. Dari ketiga aspek tersebut diharapkan saling mengisi dan dibutuhkan oleh masyarakat untuk saat ini dan masa depan, sehingga sebagai analisis penulis bahwa pengembangan desa wisata berkelanjutan dapat menjadi solusi ditengah globalisasi

untuk semakin memberdayakan potensi masyarakat, budaya, alam sebagai modal kehidupan.

Masih berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti bahwa cara pemerintah desa baha dalam membuat perencanaan program pengembangan desa wisata melalui studi wawancara dengan beberapa informan serta dokumentasi yang diperoleh lapangan menunjukkan bahwa pengembangan desa wisata di desa baha dilakukan melalui beberapa cara dengan tahapan-tahapan. Adapun pengembangan desa wisata oleh Pemerintah Desa Baha, dilakukan sebagai upaya untuk melaksanakan amanat perencanaan pembangunan Desa Baha, karena pengembangan desa wisata merupakan bagian dari perencanaan pembangunan desa.

Perencanaan pembangunan desa di desa baha merupakan proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan Pembangunan Desa Baha sesuai dengan Visi dan Misi Desa Baha.

Berdasarkan hasil analisis peneliti adanya tujuan, target, sasaran dalam program pengembangan desa wisata di Desa Baha merupakan hal yang positif, sehingga pengembangan desa wisata sudah di rencanakan dengan desain yang terarah,

sehingga dapat mempermudah Pemerintah Desa Baha dalam melakukan langkah-langkah yang terarah sesuai dengan tujuan, target, sasaran pengembangan desa wisata. Sebagai bagian dari praktik perencanaan program pengembangan desa wisata, maka dalam sudut pandang peneliti sudah tepat dilakukan

4.2 Fungsi Pengorganisasian Sumber-Sumber Pemerintahan

Pengorganisasian sumber-sumber pemerintahan merupakan satu kesatuan pada praktik manajemen pemerintahan desa dalam pengembangan desa wisata di Desa Baha Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Provinsi Bali. Adanya urgensi dalam pengorganisasian sumber-sumber pemerintahan dilakukan sebagai upaya Pemerintah Desa Baha untuk merealisasikan program pengembangan desa wisata sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pada tahapan ini pemerintah desa baha melakukan pengorganisasian melalui identifikasi mengenai sumber-sumber pemerintahan melalui Tim Kerja yang melibatkan pengelola desa wisata telah melakukan penetapan sumber daya diantaranya sumber daya manusia/ aparatur, sumber daya alam/ budaya, sumber daya pembiayaan, sumber daya regulasi.

Masih berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa potensi dan kebutuhan yang telah terorganisasikan oleh kepala desa untuk mendukung pelaksanaan program pengembangan desa wisata di desa baha, diantaranya beberapa potensi terkait dengan sumber daya manusia meliputi aparatur yang dinilai memiliki kompetensi dalam bidang pengembangan desa wisata, selain dari sisi aparatur juga penggalangan dukungan serta rekrutmen potensi dari masyarakat setempat dari berbagai komunitas seperti kelompok sadar wisata (Pokdarwis), kelompok desa wisata, komunitas subak serta kelompok lainnya yang diangkat sebagai pengelola desa wisata sebagai mitra Pemerintah Desa Baha yang memberikan kontribusi positif bagi pengembangan desa wisata di desa baha, selain itu adanya pengorganisasian terhadap berbagai potensi alam dan budaya di desa baha, seperti penetapan berbagai potensi alam seperti subak, mata air atau beji, tradisi mupud dan seterusnya.

Adanya peran pengorganisasian dalam pengembangan desa wisata yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Baha dalam praktiknya dilaksanakan secara teknis dibawah bimbingan, arahan urusan seksi pemerintahan terhadap pengelola desa wisata yang di bentuk oleh pemerintah desa baha berdasarkan surat keputusan kepala desa atau perbekel yang

dituangkan kedalam berita acara. Adapun secara keanggotaan pengelola desa wisata terdiri dari pengurus kelompok sadar wisata (Pokdarwis), kelompok desa wisata (Pokdewi), serta perwakilan masyarakat lainnya yang memiliki kepedulian secara langsung untuk terlibat dalam pengembangan desa wisata

4.3 Fungsi Penggerakan Sumber-Sumber Pemerintahan

Aspek penggerakan sumber-sumber pemerintahan dalam praktik manajemen pemerintahan dalam pengembangan desa wisata di Desa Baha Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Provinsi Bali merupakan bagian sangat penting.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan adanya peran utama Pemerintah Desa, terutama kepemimpinan kepala desa dinas (perbekel) selaku pimpinan Pemerintah Desa Baha dalam melaksanakan fungsi kepemimpinan terhadap penggerakan sumber-sumber pemerintahabn melalui aktifitas komunikasi, koordinasi, kolaborasi diantaranya dalam mengelola sumber daya aparatur, sumber daya pembiayaan, regulasi, potensi kewilayahan, selain dari peran kepala desa yaitu merujuk kepada peran perangkat desa pada tim kerja khususnya yang membidangi urusan pembangunan desa salah

satunya melalui pengembangan desa wisata oleh seksi pemerintahan.

Sebagai temuan dalam penelitian dalam penggerakan sumber-sumber pemerintahan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Baha, sebagai berikut, *Pertama*, komunikasi, pertemuan rutin maupun tidak rutin seperti paruman desa, kunjungan kepada warga desa dalam rangka penggalangan dukungan dari masyarakat luas, dan pelibatan berbagai aktor pemangku kepentingan di Desa Baha diantaranya pengelola desa wisata, komunitas subak, kelompok sadar wisata (pokdarwis), kelompok desa wisata (pokdewi), karang taruna, lembaga pemberdayaan masyarakat, bendesa adat, serta seluruh banjar desa adat untuk turut serta dalam pengembangan desa wisata, melalui saluran komunikasi baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendayagunakan sumber-sumber pemerintahan demi kelancaran program pengembangan desa wisata.

Kedua koordinasi, pengaturan, memadukan, mengintegrasikan kepentingan bersama Desa Baha dalam pelaksanaan program pengembangan desa wisata, baik dilakukan dengan kelompok pengelola desa wisata, Pemerintah Kabupaten Badung melalui Dinas Pariwisata, Pemerintah Kecamatan Mengwi, Badan Permusyawaratan Desa Baha, Perangkat Desa Adat, Banjar Desa, terutama pada internal kelembagaan Desa

Dinas Baha untuk memastikan bahwa sumber-sumber pemerintahan pada program pengembangan desa wisata dilaksanakan.

Ketiga, kolaborasi, memfasilitasi kerjasama dengan seluruh pihak agar dapat mengoptimalisasikan penggalan terhadap seluruh potensi Desa Baha yang dapat dimanfaatkan bagi pengembangan desa wisata melalui komunikasi positif, memperoleh berbagai informasi, dan membangun persepsi bersama pentingnya kolaborasi

Tabel 1. Realisasi Penggerakan Sumber-Sumber Pemerintahan Desa Wisata Desa

| No | Hasil |
|----|--|
| 1 | Terdapatnya penataan wilayah pertanian tanaman padi (sawah) dengan sistem subak yang masih lestari, dengan membangun museum subak sebagai daya tarik wisata. |
| 2 | Terdapatnya paket wisata <i>tracking</i> dengan menelusuri potensi alam lingkungan desa yang masih alami; |
| 3 | Terdapatnya jalur trekking / cycling yang merupakan ikon Desa Wisata Baha |
| 4 | Terdapatnya percontohan budidaya ikan dengan pemberian probiotik pada pakan ikan |
| 5 | Terdapatnya percontohan budidaya rosella mulai dari pembibitan sampai pada proses panen dan pelatihan pembuatan varian produk dari bunga rossella |

| | |
|---|--|
| 6 | Terdapatnya pembangunan Spot Selfie dan stop over berupa bale segi enam, bale segitiga, dan bantuan balei informasi |
| 7 | Terdapatnya pelatihan penggunaan aplikasi berbasis android untuk memudahkan komunikasi dan informasi antara penghasil smapah dan pengepul agar bermanfaat. |

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2022

4.4 Fungsi Kontrol Pemerintahan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, menunjukkan bahwa fungsi kontrol pemerintahan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Baha selama ini dilakukan mendasarkan pada program pengembangan desa wisata yang telah ditetapkan sebelumnya, terutama mengenai siapa yang melaksanakan, alokasi dana yang dianggarkan, potensi apa saja yang dikembangkan, pada intinya secara keseluruhan diharapkan dapat mendukung terselenggaranya program pengembangan desa wisata di Desa Baha di Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Provinsi Bali.

Adanya pelaksana fungsi kontrol pemerintahan atau pelaksana pengawasan pada konteks praktik manajemen pemerintahan dalam pengembangan desa wisata di Desa Baha Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Provinsi Bali, yaitu secara internal dilakukan oleh Kepala Desa selaku pimpinan pemerintah desa, dan perangkat desa sebagai pelaksana

teknis program pengembangan desa wisata, sementara terdapat pelaksana kontrol pemerintahan atau pelaksana pengawasan eksternal diluar struktur pemerintah Desa Baha, yaitu kelompok pengelola desa wisata, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya di desa baha secara luas dan partisipatif turut serta mengawasi program pembangunan desa salah satunya pengembangan desa wisata.

Menyadari adanya kekurangan-kekurangan pelaksanaan pengembangan desa wisata di desa baha menunjukkan bahwa fungsi penggerakan sumber-sumber pemerintahan dan fungsi kontrol pemerintahan belum dilakukan secara optimal, namun melalui tindakan korektif yang dilakukan sebagai upaya perbaikan terhadap pelaksanaan program pengembangan desa wisata selama ini sudah memberikan dampak perubahan, adapun dampak perubahan tersebut dapat di uraikan sebagai berikut :

Tabel 2. Dampak Dari Kontrol Pemerintahan Desa Baha

| No | Dampak Kontrol Pemerintahan |
|----|--|
| 1 | Terbangunnya kesadaran warga desa dibuktikan dengan adanya partisipasi. |
| 2 | Terbentuknya kelompok pengelola desa wisata di desa baha yang terlibat dalam pengembangan desa wisata bersama pemerintah desa. |
| 3 | Adanya unit usaha pengembangan desa wisata sebagai program |

| | |
|---|--|
| | Badan Usaha Milik Desa yang diinisiasi oleh Pemerintah Desa, BPD, masyarakat dan seterusnya, sebagai bagian penting dari perekonomian desa |
| 4 | Adanya kerjasama secara khusus yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Baha bersama beberapa Perguruan Tinggi terkait pengembangan desa wisata seperti Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia (STIMI) Handayani Denpasar, Universitas Mahasaraswati Denpasar, dan seterusnya. |
| 5 | Terangangkannya alokasi dana yang dikaitkan secara langsung dengan pengembangan desa wisata, seperti project infrastruktur jalan usaha tani, pengadaan tempat sampah, sanggah catu dan seterusnya |
| 6 | Berkembangnya infrastruktur pendukung terkait dengan pengembangan desa wisata di desa baha, akses jogging track, jalan, jembatan, irigasi, tempat sampah dst. |

pengembangan desa wisata telah memfasilitasi, meregulasi, melayani berbagai aktor pemerintahan berbasis komunitas pengelola desa wisata pada berbagai agenda pertemuan untuk membuka ruang dialog dan diskusi untuk menghasilkan berbagai konsensus kerjasama, serta memberikan konsultasi kepada berbagai pihak yang berkepentingan terhadap pemanfaatan ruang di desa baha untuk terlibat dalam mengembangkan berbagai potensi wisata berbasis pengabdian masyarakat sebagai bagian dari fungsi pelayanan kepada publik, termasuk dilakukan bersama dengan berbagai perguruan tinggi di Provinsi Bali.

Kedua, fungsi perencanaan dalam pengembangan desa wisata sebagai bagian dari praktik manajemen pemerintahan di desa baha telah dilakukan melalui serangkaian proses musyawarah desa pada forum musyawarah rencana pembangunan desa di awal masa kerja untuk membahas dan menetapkan dokumen rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDesa) setiap 6 tahun sekali, serta rencana kerja pemerintah (RKP) setiap tahun sekali, fungsi perencanaan yang telah dilakukan untuk memastikan bahwa pengembangan desa wisata menjadi salah satu program desa yang harus mendapatkan perhatian dan dilaksanakan dengan maksud dan tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan warga desa di Desa Baha.

5. Kesimpulan dan Rekomendasi

5.1 Kesimpulan

Sebagai kesimpulan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa adanya praktik manajemen pemerintahan dalam pengembangan desa wisata di Desa Baha Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Provinsi Bali, dengan uraian sebagai berikut, *pertama*, Pemerintah Desa Baha sebagai penentu kebijakan

Adanya kontribusi dan dampak positif dari fungsi perencanaan diantaranya meningkatnya kesiapan sumber daya pelaksana, pembiayaan, serta sumber dukungan lainnya yang lebih terencana, terarah, terprogram, dengan adanya fungsi perencanaan cukup membantu penyelenggara pengembangan desa wisata di desa baha untuk mengeksekusi sesuai dengan kesepakatan, sehingga berbagai kegiatan pengembangan desa wisata terhindar dari hal-hal yang bersifat sporadik.

Ketiga, fungsi pengorganisasian terhadap sumber-sumber pemerintahan dalam pengembangan desa wisata di Desa Baha Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Provinsi Bali telah dilakukan terhadap beberapa hal, diantaranya sumber daya manusia/ aparat, sumber daya alam, sumber daya pembiayaan, sumber daya regulasi, secara keseluruhan pengorganisasian tersebut dilakukan melalui beberapa tahap yaitu pembentukan tim kerja, identifikasi sumber daya, penetapan sumber daya, pengembangan sumber daya. Adanya dampak positif dari pelaksanaan pengorganisasian sumber-sumber pemerintahan pada praktik manajemen pemerintahan dalam pengembangan desa wisata di Desa Baha Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Provinsi Bali, diantaranya terpetakannya aktor-aktor pemangku kepentingan, alokasi pembiayaan, potensi alam budaya, daftar produk hukum sehingga

memudahkan dalam menetapkan sasaran pengembangan desa wisata sebagai dasar untuk dilakukannya eksekusi melalui penggerakan sumber-sumber pemerintahan tersebut.

Keempat, fungsi penggerakan terhadap sumber-sumber pemerintahan dalam pengembangan desa wisata di Desa Baha Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Provinsi Bali telah dilakukan terhadap sumber-sumber pemerintahan yang sebelumnya dilakukan melalui pengorganisasian. Sebagai temuan dalam penelitian bahwa upaya penggerakan sumber-sumber pemerintahan telah memberikan dampak positif dengan adanya realisasi seperti penataan wilayah, infrastruktur, layanan pendukung transportasi, informasi, akomodasi serta promosi, kerjasama pemerintahan dan lainnya yang secara keseluruhan terkait dengan pengembangan desa wisata di Desa Baha Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Provinsi Bali.

Kelima, fungsi kontrol pemerintahan terhadap penggerakan sumber-sumber pemerintahan dalam pengembangan desa wisata di Desa Baha Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Provinsi Bali telah dilakukan sebagai upaya untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan-penyimpangan terhadap segala hal yang telah direncanakan sebelumnya, serta melalui kontrol

pemerintahan upaya tindakan korektif memberikan dampak perubahan diantaranya saat ini terbangunnya kesadaran warga desa dibuktikan dengan adanya partisipasi, terbentuknya kelompok pengelola desa wisata di desa baha yang terlibat dalam pengembangan desa wisata bersama pemerintah desa, selanjutnya adanya unit usaha pengembangan desa wisata sebagai program Badan Usaha Milik Desa yang diinisiasi oleh Pemerintah Desa, BPD, masyarakat dan seterusnya, sebagai bagian penting dari perekonomian desa, kemudian adanya kerjasama secara khusus yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Baha bersama beberapa Perguruan Tinggi.

5.2 Rekomendasi

Rekomendasi dalam penelitian ini diharapkan menjadi masukan yang positif dan konstruktif bagi seluruh aktor pemangku kepentingan dari berbagai latar belakang terutama bagi Pemerintah Desa Baha Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Provinsi Bali. *Pertama*, Pemerintah Desa Baha perlu untuk mengoptimalkan perannya dalam mengembangkan desa wisata termasuk memperluas komposisi aktor jaringan yang terlibat dalam pengembangan desa wisata, sebagai upaya penguatan jaringan pemerintahan yang semakin lebih baik.

Kedua, perlunya ditingkatkan intensitas pertemuan seluruh keterwakilan aktor pemangku kepentingan dalam berbagai kesempatan sebagai upaya pergerakan prinsip bersama, motivasi bersama dan kapasitas bersama untuk mendorong tindakan kolaborasi yang lebih sinergi, yang berorientasi pada terwujudnya desa wisata maju yang lebih efektif dan berkesinambungan.

Ketiga, perlunya pemantapan formulasi mengenai praktik manajemen pemerintahan dalam pengembangan desa wisata di berbagai wilayah desa secara inovatif disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah agar setiap daerah dapat memperoleh pelajaran dengan berbagai perbandingan.

Daftar Pustaka

Theory and Practice. Thousand Oaks, CA: Sage Publications

Acuan dari buku:

Creswell, J. W. 2013. *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Flick, U. 2018. *Designing Qualitative Research*. London: Sage Publications.

Kusuma, A., & Kusumawati, N. (2018). *Membangun Good Governance di Tingkat Desa: Perspektif Hukum, Ekonomi, dan Administrasi*. Jakarta: Rajawali Pers.

Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan)* Jilid 2. Jakarta: Rineka Cipta

Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Mill, Christine Robert dan M. Alastair Morrison. 2012. *The Tourism System*. USA: Kendall Hunt.

Patton, M. Q. 2015. *Qualitative Research & Evaluation Methods: Integrating*

Prasojo, E. 2021. *Membangun Good Governance di Desa: Menuju Desa Mandiri dan Berdaya Saing*. Jakarta: Kencana.

Acuan artikel dalam Jurnal:

Ansell, Chris, & Alison Gash, 2007, *Collaborative Governance in Theory and Practice*, Journal of Public Administration Research and Theory, Vol.18 No.4, Hlm. 543-571

Emerson, Kirk., Tina Nabatchi & Stephen Balogh (2012). *Integrative Framework for Collaborative Governance*, Journal of Administration Research and Theory, Vol. 22 no. 1, hal. 1-29.

Komarudin, M. 2022. *Perubahan Sosial di Pedesaan di Era Digital*. Jurnal Sosiologi Pedesaan, 11(1), 1-15.

Nalayani, N.N.A.H. 2016. *Evaluasi dan Strategi Pengembangan Desa Wisata Di Kabupaten Badung, Bali*. JUMPA, 2 (2), 189–198

Oka, Prasiasa Dewa Putu. 2021. *Optimalisasi Pengembangan Desa Wisata Baha*

- Berbasis Pendampingan*. Jurnal Ilmiah Populer Volume 3.: Widyabhakti Denpasar
- Terapannya dalam Penelitian. Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- Utomo, B., & Suryaningtyas, N. 2019. *Good Governance di Desa: Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Gava Media
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Prasetyo, A., & Wibowo, M. A. (2017). *Pengembangan Desa Wisata sebagai Solusi Alternatif Pengembangan Ekonomi Pedesaan di Indonesia*. Jurnal Manajemen Kepariwisata, 11(1), 41-54.
- Zalazar, N.B. (eds). 2015. *Global Heritage A Reader*. Blackwell, pp: 167–188
- Widanarto, Agustinus, 2016, *Transformasi Manajemen Pemerintahan Dari Aspek Lingkungan Di Kota Bandung* .Volume 2 No 2 : Universitas Padjajaran
- Rasyid, A. A. 2019. Pengembangan Desa Wisata sebagai Strategi Pemberdayaan Masyarakat Desa. Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota, 30(2), 115-126.
- Sanjaya, E. 2020. *Filsafat Penelitian Sosial: Memahami Metode, Paradigma, dan Etika Penelitian*. Jakarta: Prenada Media Group
- Sumarno. 2017. *Perubahan Sosial Ekonomi Masyarakat Desa di Era Globalisasi*. Jurnal Kependudukan Indonesia, 12(2), 113-124.
- Sutopo, H. B. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Dasar Teori dan*